secara bersama-sama.

Ketua KPU Asih Nuryan-

ti dan Sekda Sri Suhartanta

WONOSARI (KR) - Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul be-

kerja sama dengan PT Pos Indonesia melaku-

kan pengiriman logistik pemilihan kepala da-

2025, Bapemperda Siap Selesaikan 9 Raperda

dan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2025 siap menyelesaikan program pemperda (propemperda) sebanyak 9 Rancangan Perda (Raperda).

"Kesembilan Raperda tersebut 5 Raperda Eksekutif yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Raperda RPJMD setelah bupati dilantik maka harus menyesuaikan visi misinya dengan RPJMD 2025-2029. Karena RPJMD itu parsial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045," kata Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kulonprogo R Sunarwan SE, Senin (25/11).

Kemudian tentang Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan da tahun 2025 sebanyak 11



Sunarwan SE

Kalurahan (BPKal), dan Keuangan Kalurahan. Sedangkan 3 lainnya adalah Raperda Komulatif Terbuka /APBD yaitu Pertanggungjawaban APBD 2024, Perubahan APBD 2025, dan APBD 2026. Serta 1 Raperda Inisiatif DPRD yaitu Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Lansia.

Sebenarnya, lanjut Sunarwan, target PropemperRaperda, namun hanya 9, di bawah kuota. "Saya optimis Anggota Dewan dapat menyelesaikan 9 raperda tersebut. Sebenarnya kita punya beberapa inisiatif salah satunya ada Tibum, ini kami anggap penting. Dan kami juga berharap banyak Perda RTRW Kabupaten Kulonprogo itu bisa segera. Tapi karena masih berproses, maka Raperda RTRW belum masuk propemperda 2025. Bila nanti di tengah sudah siap jalan, bisa masuk perubahan 2025," ucapnya.

Terkait 3 Perda yang diselesaikan jelang akhir Bulan November ini adalah Perda Pengarusutamaan Gender, APBD 2025, dan Perubahan Bentuk BPR Kulonprogo dari Perumda menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Bank Perekonomian Kulonprogo.

(Wid)

gutan Suara (PPS).

erah (Pilkada). Upacara pelepasan dilakukan

CABUP NYOBLOS DI TPS DEKAT RUMAH

KPU Terjunkan 10 Tim Droping Logistik Pilkada

SIP MSi, Kapolres Kapolres Ary Murtini SIK MSi, Setiap tim pengiriman Forkompimda, KPU DIY, Kasat Pol PP Edy Basuki MSi, Ketua Bawaslu Andang Nugroho dan disaksikan sejumlah tamu undangan lainnya. Pengiriman logistik pilkada diselesaikan satu hari, sampai ke 144 tempat Panitia Pemun-"Droping logistik diselesaikan dalam satu hari," ka-

Gunungkidul Asih Nuryanti dalam sambutannya, Senin (25/11).

dikawal jajaran aparat keamanan, Polres, Kodim., Satpol PP dan Bawaslu. Selanjutnya di tingkat kapanewon dikawal dari jajaran kepolisian, koramil dan Panwas sampai ke PPS masing-masing wilayah. Secara teknis PT Pos menyediakan armada, personil yang mengecek barang baik naik maupun



Sekda, Ketua KPU, Kapolres dan tamu undangan melepas armada pengiriman logistik pemilu.

(27/11) besok, semua calon bupati (cabup) menggunakan hak pilih di TPS pedukuhan masing-masing. Cabup nomor urut 1 Endah Subekti Kuntariningsih SE akan memberikan suaranya di TPS Pedukuhan Geblug, Kaluta Ketua KPU Kabupaten turun. Sementara dalam rahan Kenteng, Kapan-

pemungutan suara, Rabu ewon Ponjong. Cabup nomor urut 2 Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd di TPS 23 Pedukuhan Sokoliman I, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo dan Cabup urut 3 Sunaryanta di TPS 1 Padukuhan Kwarasan Wetan, Kedungkeris, Kapanewon Nglipar. (Ewi)

PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS

Masuk Belanja Tidak Terduga

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul menganggarkan makan bergizi gratis diambilkan dari Pendapatan Asli Daera (PAD) sebesar 7,7 persen atau sebesar Rp 26 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta menyatakan anggaran pembiayaan program makan bergizi gratis dimasukkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT). Karena Pemkab masih menunggu petunjuk teknis dari program tersebut."Anggaran makan bergizi gratis kami ambil dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,7 persen ," katanya, Senin

Diakuinya bahwa APBD 2025 mengalami defisit 2 persen. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah.

Untuk menutup defisit itu, Pemkab men-

gandalkan dari pelampauan pendapatan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Intinya, bahwa defisit antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diselisihkan itu ada langkah-langkahnya atau kepastian ditutup dari mana dana berasal.

Pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 75/ 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2025 telah disampaikan batas maksimal defisit APBD TA 2025 berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. "Untuk Kategori sangat tinggi ditetapkan sebesar 3,75 persen, tinggi 3,65 persen, sedang 3,55 persen rendah 3,45 persen, sangat rendah 3,35 persen," katanya.

Patroli, Pastikan Tak Ada Kampanye Terselubung

WATES (KR) - Masa tenang dimulai sejak Minggu (24/11) hingga Selasa (26/11) atau sehari jelang pemungutan suara Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo lebih memperkuat pengawasannya dilakukan lewat patroli secara simultan pada 12 kapanewon. "Patroli ini untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye terselubung selama masa tenang. Kami akan mencegah terjadinya aktivitas pertemuan menjurus kampanye di berbagai titik potensial.

Tim tingkat kabupaten dibentuk untuk memperkuat patroli. Tim ini diterjunkan dan berkoordinasi dengan pengawas tingkat kapanewon hingga kalurahan dalam melakukan pengawasan," ungkap Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto SSos MSi, Senin

Pengawasan dilakukan pula terhadap media sosial guna memastikan tidak ada aktivitas kampanye di masa tenang. Selain itu, dipastikan pula tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang.

MASA TENANG, BAWASLU KULONPROGO

Pembersihan APK dilakukan sejak hari pertama masa tenang yaitu Minggu.

"Bawaslu juga ikut pula mengantisipasi praktik politik uang, apalagi modusnya dinilai semakin rapi. Karena itu pengawasan terhadap praktik ini akan lebih diintensifkan," tandas Marwanto.

Ditambahkan Djoko Dwiyogo Soeryopoetro ST Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kulonprogo, terhadap pembersihan APK langsung dilakukan secara serentak mulai Minggu (24/11) dari pagi hingga sore hari.

"Supaya maksimal, kami membentuk tim gabungan dengan KPU, Polres, Satpol-PP, Dinas Perhubungan Kulonprogo untuk pembersihan APK. Tim melakukan pembersihan di ruas jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten. Juga mengandalkan tim dari tingkat kapanewon hingga kalurahan," kata Djoko seraya menyatakan KPPS dan PTPS digerakkan pula untuk memastikan tak ada APK terpasang di sekitar TPS, bila ada diminta mencopot dan melaporkan ke pengawas di tingkat kalurahan dan kapanewon.

(Wid)

BANYAK GUNAKAN RUMAH PRIBADI Gencarkan Razia, Polres Amankan 1.798 Miras



AKBP Ary Murtini saat memimpin langsung operasi miras

WONOSARI (KR) - Pol-Gunungkidul terus menggencarkan pemberantasa minuman keras (miras). Bahkan sudah sebanyak 1.798 botol miras diamankan dari razia yang dilaksanakan.

" Polres maupun polsek terus menggencarkan operasi miras. Sedikitnya sudah 1.798 botol miras diamankan. Bahkan para penjual ini juga sudah mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Wonosari. Sanksi atau hukuman bahkan kini cukup meningkat karena bisa mencapai Rp 9 juta,' kata Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini SIK MSi, Sabtu (23/11)

Diungkapkan, dari pelaksanaan operasi miras, penjualan ini dilakukan di rumah pribadi, toko kelontong hingga tempat karaoke. Namun untuk paling banyak memang dilakukan atau dijual dirumah pribadi. Sehingga tidak keliatan menjual miras. Namun demikian jajaran kepolisian terus melaksanakan operasi

razia miras, sehingga bisa memberikan sanksi yang tegas bagi penjualnya.

Memang untuk tempat yang digunakan menjual miras paling banyak rumah ribadi,″ ujarnya.

Sementara itu jajara kepolisian di Polsek juga terus melakukan operasi miras. Salah satunya di Polsek Karangmojo, Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Polsek Karangmojo melaksanakan patroli rutin dan operasi minuman keras (miras) di wilayah Kapanewon Karangmojo, hari Minggu, (24/11). Patroli dan operasi dipimpin Kanit Reskrim Polsek Karangmojo Iptu M Alibahonar SH be-

serta sejumlah personel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta mencegah peredaran miras ilegal yang dapat memicu tindak kejahatan dan mengganggu ketertiban umum.

(Ded/Bmp)

JELANG PELAKSANAAN PILKADA

Bawaslu Gelar Apel Siaga Kesiapan Pengawasan

WATES (KR) - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo menggelar apel siaga kesiapan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wabup Kulonprogo, di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo, Minggu (24/11).

Apel diikuti Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kulonprogo, unsur Pemkab Kulonprogo hingga

Bawaslu DIY. Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto minta para pengawas menjalankan tugasnya dengan sungguhsungguh dan teliti untuk menjaga kemurnian hasil pesta demokrasi. "Dalam memfasilitasi rakyat untuk menyalurkan hak suaranya, maka tugas utama jajaran pengawas adalah mengawal dengan sungguhsungguh agar kemurnian suaranya tetap terjaga"

Secara teknis, tugas pengawas TPS, mengawal suara rakyat dengan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya, memastikan suara yang dihitung secara benar, hingga perekapan yang terstruktur rapi agar terkonversi menjadi hasil suara yang menentukan siapa yang terpil-

Para pengawas hendaknya melakukan pengawasan secara substantif vaitu memastikan para pemilih murni memiliki suara dari hati nurani, hingga tidak ditekan dari pihak-pihak tertentu. "Jika pemilih memiliki suara karena imingiming tertentu atau karena takut adanya tekanan pihak lain, maka kemurnian suara rakyat secara substantif belum terwujud," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, masa tenang para pengawas pe-



Apel siaga ditutup dengan membunyikan sirine.

milu memiliki peran penting menjaga upaya-upaya yang bertujuan mempengaruhi suara masyarakat.

"Ini kesempatan bagi anda untuk membuktikan hadirnya pengawas memberikan manfaat besar untuk mengawal proses demokrasi, dengan hadirnya pengawas setidaknya anda bisa menemukan potensi pelanggaran untuk dicegah dan Bawaslu menekankan strategi pengawasan," jelas-

Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi

MMA mengatakan, tahapan pemungutan dan perhitungan suara hal sangat krusial sehingga kegiatan apel siaga dinilai sangat penting sebagai bentuk persiapan menghadapi pesta demokrasi.

"Saya mengapresiasi Bawaslu Kulonprogo telah mengadakan apel siaga, sebagai bentuk persiapan pengawasan serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara," tegasnya.

(Rul)

Kalurahan Purwoharjo Terbaik Pertama

WATES (KR) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo menggelar penghargaan pada Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan, Lembaga Keuangan Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Unit Pengelola Kegiatan di Aula Adikarta, Gedung Kaca, Komplek Pemkab Kulonprogo.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintahan kalurahan atas kinerja yang telah dilakukan. Apresiasi diberikan pada kalurahan atas capaian kinerja dan mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan baik.

Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh menjadi terbaik pertama kategori akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 2024.

Penjabat (Pj) setempat Srie Nurkyatsiwi mengatakan, tata kelola pemerintahan kalurahan yang melibatkan peran serta masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan.

"Dalam penyelenggaraan kalurahan kita tidak hanya sekadar jadi petugas di kantor tapi banyak di luar untuk mengetahui kondisi daerah kita, berpegang teguh pada regulasi. Afirmasi dan partisipasi masyarakat diperlukan, prinsipnya harus transparan, akuntabel, efisien, efektif dan berkelanjutan," tegas Siwi, belum lama ini.

"Penyelenggaraan akuntabilitas dan kinerja kalurahan harus sesuai untuk melihat sejauh mana sistem dan kebijakan tersebut mampu dilaksanakan, maka diperlukan data yang jelas dan tepat dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di tingkat kalurahan," tambahnya.

Siwi berharap melalui tata kelola pemerintah kalurahan yang baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. "Mulai berbenah untuk menyiapkan konsep dan tata kelola pemerintahan kalurahan, kedepankan pelayanan publik berinovasi sesuai perkembangan regulasi. Saling bekerja sama antarlembaga, manfaatkan teknologi yang ada, ciptakan pemerintahan kalurahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

"Bersama-sama kita belajar membenahi untuk menjalankan tugas sesuai regulasi, kita berjalan baik istikomah sesuai apa yang diharapkan masyarakat," tutur Siwi. (Rul)

DUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI

ITNY Serahkan Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna

NANGGULAN (KR) -Sebagai bagian dari program Pembinaan Industri Rumah Tangga-Usaha Mikro (IRT-UM) Berbasis Kemitraan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (IT-NY) menyerahkan bantuan berupa alat Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Jatisarono di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, Kamis (21/11) lalu. Alat Teknologi Tepat Guna yang diserahkan berupa mesin pengaduk adonan, vacuum sealer,

kompor dan penggorengan. Penyerahan alat dilakukan secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang III ITNY, Dr Winarti ST MT di rumah produksi KDK Jatisarono. Alat-alat tersebut diterima Arif Budi Santoso AMd se-



Arif Budi Santoso AMd. laku Lurah Jatisarono. Penyerahan bantuan berupa alat-alat produksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh ITNY kepada KDK Jatisarono. Di samping memberikan bantuan berupa alat-alat produksi, ITNY juga memberi-

kan pendampingan terkait perijinan berbasis risiko, pendampingan packaging dan labeling produk kemasan, pelatihan digital marketing, dan pelatihan penggunaan alat-alat TTG.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III ITNY menjelaskan, penyerahan

bantuan alat-alat TTG ini merupakan wujud pelaksanaan amanat yang diterima oleh ITNY dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk menjalankan pendampingan kepada pelaku IRT-UM. Alat-alat yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku IRT-UM meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga nantinya memberikan kebermanfaatan berupa peningkatan kesejahteraan pelaku IRT-UM.

Wakil Rektor III ITNY juga menjelaskan melalui rangkaian kegiatan pendampingan ini, ITNY ingin hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyara-